

BIN Sebut Generasi Muda Target Potensial Jaringan Teror Sebarakan Radikalisme

JAKARTA (IM) - Badan Intelijen Negara (BIN) meng-

atakan generasi muda menjadi jaringannya untuk menyebarkan radikalisme. Kelompok teror disebut memanfaatkan sikap kritis pemuda.

"Hingga saat ini, generasi muda ditargetkan masih menjadi target potensial jaringan kelompok teror. Selain itu, tentan menjadi sasaran brain wash, karena pertimbangan kemampuan dan sikap kritisnya," ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purno dalam diskusi Anak Tiri Demokrasi di Aula Ma'had IPTQ, Jl Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan (26/11).

Wawan mengatakan generasi muda rentang usia 17-24 tahun banyak yang menelan mentah-mentah dalam menerima informasi. Menurutnya, radikalisme di kalangan generasi muda berawal dari adanya tular pendapat yang intens dengan jaringan radikal di tengah masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan.

"Persentuhan kalangan generasi muda dengan radikalisme ditakutkan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas nasional," katanya.



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Dengan ini Direksi PT. Triwira Insanlestari Tbk ("Perseroan") mengundang rapat para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/LB"), Yang selanjutnya disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 19 Desember 2019
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : Oakroom, Oakwood Mega Kuningan Lt 3 Jalan Mega Kuningan Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat Sebagai Berikut:

1. Persetujuan Rencana Perubahan dan Atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)
2. Persetujuan Penggabungan dan/atau Peleburan Usaha (Penggabungan atau Peleburan Usaha)
3. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Kelenturan Umum:

- 1) Perseroan tidak mengizinkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga klien panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- 2) Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham/Perseroan pada Hari Selasa, 26 November 2019 di Biro Administrasi Efek ("BAE"). Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari Selasa 26 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB
- 3) Bagi pemegang Saham Perseroan yang sahamnya yang dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, konfirmasi tertulis untuk Rapat dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- 4) Bagi pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Para Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam penjumlahan suara.
- 5) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jln Kirana Avenue Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 Indonesia
- 6) Semua Surat Kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin 16 Desember 2019 sampai pukul 16.00 WIB melalui Kantor BAE PT. Adimitra Jasa Korpora
 - a. Para Pemegang Saham atau para kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang member kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya badan hukum tersebut
- 7) Bahan mata cara Rapat tersedia sejak tanggal penerbitan Rapat Sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.
- 8) Bahan mata acara Rapat bisa diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada ditempat Rapat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat di mulai

Jakarta, 27 November 2019
PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk.
Direksi

2 Polhukam

Ketua MPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Rusia

"Informasi dari Duta Besar Rusia, sekitar 11 negara sudah menjalin kerja sama dengan mereka untuk membangun PLTN. Dengan tingkat keamanan 5 kali lebih tinggi dibanding PLTN Fukushima, teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sejauh ini belum menghadapi kendala signifikan yang mempengaruhi keselamatan manusia. Indonesia juga perlu memulainya selanjutnya ke arah PLTN, sehingga tak selamanya bergantung kepada PLTU," jelas Bambang Soesatyo.

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan 70 tahun hubungannya diplomatik Indonesia-Rusia,

Presiden Rusia Vladimir Putin diundang untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Momentum ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet pun mendorong kerja sama kedua negara dapat saling menguntungkan.

"Tawaran Rusia kepada Indonesia untuk membeli 11 pesawat Sukhoi-35, melengkapi kekuatan tempur pertahanan udara dan sistem keandalan demi menjaga ketahanan Indonesia, ataupun tawaran dari berbagai negara sahabat lainnya, kita sambut baik. Terpenting kerja sama tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sesuai dengan kondisi anggaran negara," kata Bamsoet saat menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Lyudmila Georgievna Verbitseva di Jakarta, yang dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11).

Phaknya pun mengapresiasi Rusia yang sukses membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sebesar 20% kebutuhan listrik nasional mereka bisa terpenuhi dari PLTN. Negara seperti Iran, India, Finlandia, Uzbekistan, dan Turki juga sudah bekerja sama dengan Rusia dalam membangun PLTN.

"Informasi dari Duta Besar Rusia, sekitar 11 negara sudah menjalin kerja sama dengan mereka untuk membangun PLTN. Dengan tingkat keamanan 5 kali lebih tinggi dibanding PLTN Fukushima, teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sejauh ini belum menghadapi kendala signifikan yang mempengaruhi keselamatan manusia. Indonesia juga perlu memulainya selanjutnya ke arah PLTN, sehingga tak selamanya bergantung kepada PLTU," jelas Bambang Soesatyo.



Tito: Politik RI Stabil Setelah Bergabungnya Kubu 01

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bicara tentang kunjungannya ke Malaysia beberapa waktu lalu. Menurutnya, tokoh-tokoh di Malaysia memiliki politik Indonesia sudah stabil usai bergabungnya Kubu 01 dan 02.

"Dalam pandangan Malaysia, kemah saya bertemu dengan banyak tokoh di sana, langkah politik Indonesia stabil sekarang, terutama semenjak gabungan 01

sama 02, tinggal urusannya 212 aja," kata Tito dalam sambutannya di acara Munas APPSI VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Tito mengatakan kondisi itu berbalik dengan kondisi di Malaysia. Tito mengatakan politik di Malaysia sedang tidak stabil karena ada tarik-menarik antara kelompok oposisi dan pemerintah. "Belum lagi janji prime minister step down digantikan Anwar Ibrahim yang juga belum jelas timing-nya kapan," ucapnya.

Tito mengatakan, setelah rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02 sesuai Pilpres dan suasana politik mulai stabil, pengusaha Malaysia malah banyak ingin berinvestasi di Indonesia. Tito menyebut, dalam pandangan negara lain, kondisi politik di Indonesia stabil.

"Jadi intinya kira-kira dalam pandangan luar, Indonesia sekarang ini politiknya stabil sehingga ada keistimewaan tinggi," sambung Namun, dia r inginan investor mnesia masih terhambat dan kepastian hukum menjadi tantangan harus segera dituntaskan.

"Tu pertama keberhasilan dan lain tidak sekuat lembaga mungkin, tutur mantan Kap-